

Navigasi Baru Diplomasi Indonesia: Analisis Perubahan Politik Luar Negeri Pasca Pemindahan Ibu Kota

New Navigation of Indonesian Diplomacy: An Analysis of Foreign Policy Changes After the Move of the Capital City

Yayuk Anggraini^{1✉}, Rendy Wirawan², Frisca Alexandra³, Braily Diaz Nizardi Bhakti⁴, Ailsa P. Saskira Laksono⁵

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

³Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

⁴Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

⁵Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: yayukanggraini1001@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia pasca pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis kebijakan dan wawancara, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pemerintah Indonesia beradaptasi dengan perubahan ini serta apa tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia pasca pemindahan ibu kota negara dan bagaimana pemindahan ibu kota menjadi bagian dari agenda diplomasi ekonomi, politik, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nusantara, sebagai ibu kota baru, dirancang untuk menjadi pusat diplomasi hijau dan ketahanan ekonomi yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang diharapkan meningkatkan posisi Indonesia dalam forum internasional. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam transisi kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan infrastruktur diplomatik, perubahan dinamika kekuatan regional, dan upaya Indonesia untuk mempertahankan peran aktif di kawasan ASEAN dan G20.

Abstract

This study aims to analyze Indonesia's foreign policy after the relocation of the country's capital from Jakarta to the archipelago. Using a qualitative approach through policy analysis and interviews, this study explores how the Indonesian government is adapting to these changes and what challenges the Indonesian government faces after the relocation of the national capital and how the relocation of the capital is part of the economic, political, and environmental diplomacy agenda. The results show that the archipelago, as the new capital, is designed to be a center for green diplomacy and economic resilience that is aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs), which are expected to enhance Indonesia's position in international forums. The research also identifies challenges in foreign policy transitions related to diplomatic infrastructure, changes in regional power dynamics, and Indonesia's efforts to maintain an active role in the ASEAN and G20 regions.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Yayuk Anggraini, Rendy Wirawan, Frisca Alexandra, Braily Diaz Nizardi Bhakti, Ailsa P. Saskira Laksono.

Article history

Received 2025-04-10

Accepted 2025-06-30

Published 2025-07-11

Kata kunci

Ibu Kota;
SDGs;
Kebijakan Luar Negeri.

Keywords

Capital City;
SDGs;
Foreign Policy.

1. Pendahuluan

Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, telah lama menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan. Dengan populasi yang melebihi 10 juta jiwa, Jakarta menghadapi berbagai permasalahan serius, mulai dari kemacetan lalu lintas yang parah, polusi udara yang tinggi, hingga risiko banjir yang terus meningkat akibat penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hampir 40% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut, yang menjadikannya salah satu kota paling rentan terhadap perubahan iklim. Selain itu, Jakarta juga mengalami tingkat urbanisasi yang sangat tinggi, yang menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Dalam konteks ini, pemindahan ibu kota dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi beban Jakarta sekaligus mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Lokasi baru ibu kota di Kalimantan Timur, yang terletak di tengah kepulauan Indonesia, dipilih karena dianggap memiliki risiko bencana alam yang lebih rendah dan akses yang lebih baik ke wilayah-wilayah yang selama ini kurang berkembang, khususnya Indonesia Tengah dan Timur.

Namun, lebih dari sekadar solusi domestik, pemindahan ibu kota ini juga memiliki dimensi internasional yang signifikan. Kalimantan Timur berada dekat dengan Laut China Selatan, salah satu kawasan paling strategis dan sensitif secara geopolitik di dunia. Pemindahan ibu kota ini secara langsung menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih dekat dengan dinamika geopolitik yang berkembang di kawasan tersebut, yang berpotensi mempengaruhi politik luar negeri Indonesia dalam beberapa dekade mendatang.

Pemindahan ibu kota juga dapat meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam inisiatif geopolitik global yang dipimpin oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China. Dalam beberapa tahun terakhir, Asia-Pasifik telah menjadi medan persaingan geopolitik antara AS dan China, dengan kedua negara tersebut berusaha memperluas pengaruh mereka di kawasan ini. Sebagai contoh, kebijakan "Pivot to Asia" yang dicanangkan oleh pemerintahan Obama pada awal 2010-an menunjukkan komitmen AS untuk memperkuat kehadirannya di Asia-Pasifik, sementara Belt and Road Initiative (BRI) yang dipimpin oleh China juga telah menggarisbawahi ambisi Beijing untuk membangun infrastruktur dan memperkuat hubungan ekonomi di kawasan tersebut.

Dalam konteks ini, Indonesia, dengan ibu kota barunya yang terletak di jantung Asia-Pasifik, akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menavigasi dinamika geopolitik ini. Indonesia dapat memanfaatkan pemindahan ibu kota ini untuk memperkuat hubungan bilateralnya dengan kedua kekuatan tersebut, sambil tetap menjaga kebijakan luar negeri yang independen dan tidak memihak.

Pemindahan ibu kota juga akan berdampak pada hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tetangga, khususnya Malaysia dan Brunei Darussalam yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur. Dengan ibu kota yang lebih dekat secara geografis, Indonesia dapat memperkuat kerjasama regional di berbagai bidang, termasuk perdagangan, keamanan, dan lingkungan. Selain itu, pemindahan ibu kota ini juga dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kemitraan dengan negara-negara yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di IKN, seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa.

Namun, pemindahan ibu kota juga membawa tantangan tersendiri bagi politik luar negeri Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks di Asia-Pasifik. Dengan ibu kota yang lebih dekat ke kawasan Laut China Selatan, Indonesia mungkin akan menghadapi tekanan yang lebih besar untuk terlibat lebih aktif dalam sengketa teritorial di kawasan tersebut. Selain itu, Indonesia juga harus berhati-hati dalam menjaga keseimbangan antara hubungan bilateral dengan AS dan China, mengingat kedua negara tersebut memiliki kepentingan yang berbeda di kawasan ini.

1.1. Penelitian Terdahulu

Ibu kota suatu Negara bukan hanya sebagai pusat administratif, tetapi juga menjadi tempat penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Dalam konteks Nusantara, Indonesia, dengan Jakarta sebagai ibu kotanya, menjadi contoh penting dalam pembahasan penelitian ini. Analisis ini bertujuan untuk menggali lebih dalam hubungan antara ibu kota negara di Nusantara, khususnya Jakarta, dengan kebijakan luar negeri Indonesia.

Sebagai pusat kegiatan politik dan administratif, ibu kota negara memiliki peran penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri. Dalam studi yang ditulis oleh Amanda McLeod dan Michelle Cini (2019), peran ibu kota dalam politik luar negeri ditekankan sebagai tempat dimana keputusan strategis diambil, dialog diplomatik dilakukan, dan perundingan internasional berlangsung. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam politik luar negeri yang aktif, terutama dalam mempromosikan prinsip-prinsip diplomasi bebas aktif dan perdamaian regional. Dalam penelitian Adam Tyson (2020), politik luar negeri Indonesia dianalisis dalam konteks hubungan regional, terutama dengan negara-negara tetangga dan organisasi regional seperti ASEAN. Jakarta, sebagai ibu kota dan pusat kebijakan luar negeri Indonesia, menjadi tempat penting dalam merumuskan dan melaksanakan strategi diplomasi ini.

Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta juga menjadi pusat diplomasi internasional dimana perwakilan diplomatik dari berbagai negara berkumpul. Dalam sebuah studi yang ditulis oleh Evi Fitriani (2018), Jakarta dipelajari sebagai pusat diplomasi regional dan global yang penting, dimana negosiasi bilateral dan multilateral dilakukan untuk mempromosikan kepentingan Indonesia dan membangun hubungan dengan negara lain. Keberadaan ibu kota yang dinamis menjadi aset penting dalam menjalankan diplomasi Indonesia.

Ini menunjukkan bahwa ibu kota negara, terutama Jakarta, memainkan peran kunci dalam politik luar negeri Indonesia. sebagai pusat kegiatan politik, administratif, dan diplomasi, Jakarta menjadi tempat dimana kebijakan luar negeri dibuat, dikoordinasikan serta dilaksanakan. Dengan sejarah panjang dalam politik luar negeri yang aktif, Indonesia terus menggunakan ibu kotanya sebagai panggung utama untuk memajukan kepentingan nasional dan membangun hubungan dengan negara-negara lain di dunia.

Disisi lain, saat ini Indonesia tengah menyiapkan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini tentu menimbulkan banyak dinamika, tidak hanya politik domestik yang hingga saat ini telah ada beberapa penelitian yang mendiskusikannya, seperti penelitian Hutasoit (2019), Purnomo & Chotib (2023) dan Nugroho (2022). Namun hingga saat ini belum ada penelitian yang mengulas tentang dampak pemindahan ibu kota negara Nusantara terhadap politik luar negeri Indonesia.

Studi terkait dampak pemindahan IKN dengan politik luar negeri Indonesia akan melihat dinamika politik lokal dan internasional, terutama di kawasan Asia Pasifik. Hal ini merupakan sebuah research gap yang semestinya dapat ditelusuri. Bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan akademik, tapi dapat menjadi pertimbangan oleh pemangku kepentingan terkait dengan arah politik luar negeri Indonesia.

2. Metode

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, atau kondisi tertentu secara rinci. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi juga memberikan analisis yang lebih mendalam untuk memahami hubungan, pola, atau kecenderungan yang muncul dari data yang dikumpulkan.

2.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perubahan yang mungkin terjadi pada kebijakan luar negeri Indonesia sebagai dampak pada kebijakan pemerintah dalam memindahkan ibu kota Negara dari Jakarta ke Nusantara.

2.3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan narasumber. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yang akan diperoleh dari analisis dokumen, laporan pemerintah, artikel jurnal, publikasi ilmiah, serta sumber media lainnya yang relevan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dalam bentuk *library research*. Ini mencakup pencarian, pengumpulan, dan analisis terhadap literatur berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi pemerintah yang relevan. Kemudian untuk melengkapi data yang diperoleh dari *library research*, akan dilakukan wawancara dengan narasumber.

2.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data serta informasi primer maupun sekunder yang telah diperoleh akan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi sehingga menghasilkan penyimpulan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perjalanan Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta Sampai Ke Kalimantan Timur

Wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta sebenarnya sudah muncul sejak masih jaman kolonial, yaitu pada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels (1762-1818). Daendels ingin memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Surabaya. Alasan Daendels ingin memindahkan Ibukota karena Jakarta (Batavia) banyak sumber penyakit seperti malaria dan kolera. Kemudian alasan pertahanan yang menganggap Surabaya lebih aman karena memiliki benteng dan Pelabuhan. Rencana ini berhenti ditengah jalan, lalu muncul lagi pada tahun 1920 masa Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) mengusulkan Bandung sebagai Ibu Kota Hindia Belanda.

Seiring dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Namun beberapa tahun setelah kemerdekaan, polemik Jakarta sebagai pusat pemerintahan kembali mengemuka. Pada tahun 1947, pemerintah membentuk Panitia Agung yang bertugas menyelidiki dan merencanakan penempatan Ibukota Negara yang baru. Presiden Soekarno termasuk salah satu anggota dari Panitia Agung tersebut. Rencana ini dibentuk di tengah kekacauan yang terjadi di Jakarta akibat pendudukan oleh pasukan Belanda. Saat itu, posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan telah bergeser ke Yogyakarta. Panitia Agung ini mengusulkan beberapa daerah yang dianggap layak menggantikan Jakarta sebagai Ibukota Negara, yaitu Bandung, Surabaya, Surakarta, Temanggung dan Magelang. Namun kemudian Ibu Kota kembali ke Jakarta untuk seterusnya seiring dengan penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, yang berlaku hingga saat ini. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa penetapan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara adalah kebiasaan dan praktik pemerintahan *de facto* sepanjang sejarah.

Sejak tahun 1945 hingga 1949 Ibukota Negara memang sempat berpindah-pindah secara rahasia pada masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Historia menuliskan bahwa hingga revolusi selesai dan pemerintahan kembali ke Jakarta, tak ada kejelasan terkait rencana penetapan ibu kota negara yang baru. Namun, hal itu tidak menyurutkan wacana pemindahan ibu kota. Pada tahun 1950-an, Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah dimunculkan sebagai alternatif ibukota negara yang bisa menggantikan Jakarta. Rencana pemindahan itu digagas oleh Soekarno karena Palangkaraya dipandang lebih tepat sebagai pusat pemerintahan ketimbang kota Jakarta yang

sudah terbentuk, tapi Jakarta terlalu penuh dengan simbol-simbol kolonial Belanda. Alasan lain Soekarno memilih nama Palangkaraya untuk kota baru itu, yang berarti "tempat suci, mulia, dan agung".

Dalam pidatonya yang berjudul "Pidato Palangkaraya", Soekarno mengatakan bahwa Jakarta, sebagai ibu kota, memiliki sejumlah problema antara lain lingkungan, banjir, dan kemacetan lalu lintas. Soekarno melihat Kalimantan sebagai lokasi yang strategis karena letaknya yang sentral di Indonesia, berada di tengah-tengah dan jauh dari wilayah rawan bencana alam, serta memiliki sumber daya alam melimpah. Soekarno berharap bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan dapat mendorong pembangunan ekonomi di wilayah tersebut dan sekitarnya. Soekarno ingin menggerakkan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, sehingga ekonomi Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata. Soekarno juga memiliki impian untuk memadukan konsep transportasi sungai dan keindahan kota karena Palangkaraya dibelah oleh Sungai Kahayan.

Sementara itu, dari perspektif geostrategis adanya penguatan terhadap kedaulatan bangsa, di mana pemindahan ibu kota dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang demi meningkatkan keamanan negara. Hal ini memungkinkan bagi negara untuk melakukan kontrol terhadap negara secara keseluruhan, dan mengurangi risiko invasi atau intervensi dari negara-negara lain dengan mempertimbangkan keberadaan populasi yang kecil di dunia. Soekarno memang peduli dengan isu-isu geopolitik dan ingin menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam dunia politik global. Maka pemindahan ibu kota menjadi salah satu kebijakan strategisnya, sekaligus ingin mengokohkan posisi Indonesia di kancah internasional. Meskipun saat itu Palangkaraya belum terbentuk dan langsung eksis ketika Soekarno melakukan pemancangan tiang pertama pada 17 Juli 1957. Palangkaraya harus menjadi modal dan model bagi pembangunan banyak kota di Indonesia. Dikabarkan juga beberapa kontraktor dari Rusia sudah datang ke Palangkaraya melakukan pembangunan jalan besar menuju Kotawaringin.

Namun, rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Palangkaraya belum sepenuhnya terealisasi karena berbagai kendala politik dan ekonomi yang muncul pada masa itu, seperti krisis politik dan ekonomi yang diikuti oleh perubahan pemerintahan. Secara *de jure* tahun 1961 Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Kemudian, dalam pidato peringatan ulang tahun ke-437 Jakarta tanggal 22 Juni 1964, Soekarno menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara lewat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964.

Gagasan pemindahan Ibu Kota Negara terus dibicarakan dan menjadi perhatian para pemimpin Indonesia di masa depan. Pada tahun 1997, Presiden Soeharto juga sempat berencana memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke daerah Jonggol, Jawa Barat. Rencana tersebut tertuang dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri untuk Pusat Pemerintahan. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah membicarakan wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Palangkaraya pada awal Desember 2009.

Menurut SBY, beban fungsi pelayanan dan kelayakan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara makin berat. Pembahasan pemindahan Ibu Kota Negara harus dikaji dari berbagai aspek yang tidak hanya melihat faktor kemacetan di Jakarta saja, tetapi juga dilihat sebagai upaya strategis untuk mendistribusikan pembangunan secara merata (Kompas, 5 Agustus 2010). Presiden SBY mengemukakan perlunya membentuk tim kecil yang ditugaskan untuk mengkaji ide pemindahan Ibu Kota Negara. Kemudian muncul tiga skenario dalam pemindahan Ibu Kota Negara, yaitu: tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan dilakukan pembenahan terhadap semua permasalahan; memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru yang tetap berada di pulau Jawa; dan memindahkan Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan ke lokasi baru di luar pulau Jawa (Kompas, 13 September 2010). Rencana tersebut juga tidak terealisasi karena belum menemukan titik solusi dan Ibu Kota Negara tetap berada di Jakarta.

Ketika pemerintah Joko Widodo, pembahasan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara kembali dilakukan sejak tahun 2017. Pada akhirnya, tahun 2019, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro,

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, serta Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke wilayah timur Indonesia, yaitu berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melakukan survey ke beberapa titik lokasi, selain ke Kalimantan Timur juga ke Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah sangat serius dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dan telah melakukan kajian-kajian yang lebih detail, baik dari sisi ekonomi, sosial politik, dan dari sisi lingkungan. Menurut Presiden Joko Widodo lokasi ibu kota baru ini sangat strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia. Kawasan ini juga minim bencana, seperti banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, juga kota penunjang di sekitarnya sudah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar (Kompas, 26 Agustus 2019).

Keputusan pemindahan Ibu Kota Negara yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dengan pertimbangan serupa seperti yang dikemukakan oleh Soekarno saat itu. Maka, dalam konteks pemindahan ibu kota saat ini, kita dapat melihat adanya kelanjutan dari pemikiran geopolitik politik Soekarno meskipun implementasinya berbeda dan dihadapkan pada tantangan yang berbeda pula. Namun, tujuan utamanya hampir sama, yaitu untuk memperkuat kedaulatan, pertahanan dan keamanan, mengurangi ketimpangan regional, pemerataan pembangunan nasional, mengatasi masalah perkotaan dan lain-lain. Bagaimanapun juga pemindahan ibu kota ke tempat lain dapat memicu pengurangan beban di Jakarta. Sebagai kota terpadat di Indonesia, permasalahan Jakarta sudah sangat kompleks mulai dari kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan banjir, kriminalitas serta permasalahan serius lainnya. Presiden Joko Widodo juga memberikan sejumlah alasan perlunya pemindahan Ibu Kota Negara bahwa beban pulau Jawa semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia ada di pulau Jawa, dan pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan (Kompas, 20 Juni 2023).

3.2. Perbandingan dengan Negara Lain

Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 26 Agustus 2019. Rencana pemindahan ibu kota sebenarnya bukanlah hal yang baru, pada tahun 1957 di era kepemimpinan Presiden Soekarno, usulan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah pertama kali tercetus. Alasan utama saat itu adalah untuk memiliki ibu kota yang letaknya lebih sentral secara geografis dan untuk mengurangi kepadatan di Jakarta. Namun rencana ini tidak terealisasi karena berbagai alasan, termasuk keterbatasan sumber daya juga kondisi politik domestik pada saat itu.

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, wacana pemindahan ibu kota mulai dibahas secara lebih serius. Pada tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mulai melakukan kajian mendalam terkait wacana pemindahan ibu kota hingga pada Agustus 2019, secara resmi Presiden Joko Widodo mengumumkan tentang pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Beberapa alasan utama yang mendasari keputusan ini antara lain, untuk mengurangi beban Jakarta.

Jakarta adalah salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, Jakarta memiliki kepadatan penduduk sekitar 15.000 hingga 16.000 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan laporan dari World Population Review dan Demographia World Urban Areas pada tahun 2023, Jakarta termasuk dalam daftar kota dengan tingkat kepadatan tertinggi di dunia, bersanding dengan kota-kota seperti Dhaka (Bangladesh), Mumbai (India) dan Manila (Filipina). Kepadatan ini menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah, polusi udara dan sejumlah masalah lingkungan lainnya.

Jakarta juga mengalami penurunan ranah yang signifikan setiap tahunnya, menurut penelitian dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), Jakarta mengalami penurunan tanah dengan rata-rata 1 hingga 15 cm per tahun. Kondisi ini terjadi sebagian besar disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan dan pembangunan infrastruktur yang masif. Penurunan tanah ini meningkatkan risiko banjir di Jakarta. Oleh

karenanya, banjir menjadi masalah tahunan yang semakin parah yang harus dihadapi warga Jakarta.

Indonesia bukanlah satu-satunya Negara yang memindahkan ibu kota Negaranya. Beberapa Negara lain seperti Brazil yang memindahkan ibu kota Negaranya dari Rio De Janeiro ke Brasilia pada tahun 1960, kemudian Pakistan yang memindahkan ibu kota Negaranya dari Karachi ke Islamabad pada tahun 1963, serta Malaysia yang memindahkan ibu kota Negaranya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada tahun 1999.

Pemerintah Brazil memutuskan untuk memindahkan ibu kota Negara dari Rio De Janeiro ke Brasilia dengan alasan untuk mengurangi kepadatan di Rio De Janeiro, pengembangan wilayah bagian tengah Negara Brazil, Brasilia yang terletak dibagian tengah Brazil merupakan wilayah yang kurang berkembang secara ekonomi apabila dibandingkan dengan wilayah lain, sehingga dengan pemindahan ibu kota ke Brasilia, pemerintah Brazil berharap dapat mendorong pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Sebagai ibu kota baru, Brasilia dirancang sebagai kota modern dengan desain arsitektur yang futuristik sehingga Brasilia diharapkan dapat menjadi simbol modernisasi dan kesatuan nasional.

Keputusan pemerintah Pakistan untuk memindahkan ibu kota Negaranya dari Karachi ke Islamabad pada tahun 1963 juga dilandasi alasan yang tidak terlalu jauh berbeda dengan pemerintah Brazil. Karachi dirasa terlalu padat sehingga perpindahan ibu kota ke Islamabad dianggap dapat membantu menyebarkan populasi serta mendorong pembangunan infrastruktur di wilayah lain, khususnya wilayah utara Pakistan. Islamabad juga dirancang untuk menjadi kota dengan infrastruktur modern serta lingkungan yang lebih bersih. Alasan yang sedikit berbeda bila dibandingkan dengan Brazil adalah alasan keamanan dan juga strategi pertahanan, dimana Karachi berada didekat perbatasan dengan India dan di tepi laut, sehingga dari sudut pandang keamanan, kondisi ini dianggap menjadikan Karachi wilayah yang rentan terhadap serangan militer. Sementara Islamabad dipilih karena lokasinya lebih strategis dan lebih aman karena dekat dengan pegunungan Himalaya.

Pemerintah Malaysia juga memiliki alasan yang tidak jauh berbeda dengan Brazil serta Pakistan dalam keputusannya untuk memindahkan ibu kota Negara. Pemerintah Malaysia ingin mengurangi kepadatan penduduk yang tinggi di Kuala Lumpur. Putrajaya juga dirancang khusus sebagai pusat pemerintahan dan administrasi yang modern, terpisah dari fungsi ekonomi yang masih berpusat di Kuala Lumpur, selain itu Putrajaya juga dikembangkan dengan konsep kota taman yang menekankan pada ruang hijau dan keberlanjutan lingkungan.

Melihat alasan-alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan Negara dalam memindahkan ibu kota Negaranya didasari atas kebutuhan untuk menyeimbangkan pembangunan, meningkatkan keamanan serta menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien dan terencana dengan baik. Kebutuhan yang sama juga menjadi alasan Indonesia memindahkan ibu kota Negaranya dari Jakarta ke Nusantara. Nusantara dirancang dengan konsep kota berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Selain itu, Nusantara juga diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan Indonesia yang lebih modern dan terintegrasi.

Pemindahan ibu kota ini juga sejalan dengan visi jangka panjang Indonesia menuju tahun 2045, yang dikenal juga sebagai visi Indonesia emas 2045. Visi ini mencakup empat pilar utama yakni: pembangunan manusia dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemindahan ibu kota ke Nusantara adalah bagian dari upaya untuk memperkuat pilar ketiga yakni pemerataan pembangunan. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur diluar Pulau Jawa, yang selama ini menjadi pusat kegiatan ekonomi.

Namun pemindahan ibu kota Negara tentu bukan sebuah persoalan sederhana. Masalah ekonomi, sosial, budaya, politik hingga pertahanan keamanan menjadikan proses pemindahan ibu kota menjadi persoalan yang kompleks. Pada bulan Agustus 2019, Presiden Joko Widodo bertemu Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohamad di Putrajaya dan dalam kunjungannya tersebut,

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa, Indonesia perlu belajar dari Malaysia yang sukses memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

Meskipun menurut Presiden Joko Widodo, Malaysia sukses memindahkan ibu kotanya, namun proses tersebut bukannya tanpa tantangan. Ketika proyek pembangunan di Putrajaya mulai berjalan, perekonomian dunia khususnya Asia Tenggara tengah dilanda krisis yang dikenal juga sebagai krisis Asia tahun 1997. Kondisi ini tentu saja berdampak pada proses pembangunan di Putrajaya. Pihak oposisi kala itu menilai pemerintah Malaysia melakukan pemborosan karena proses pembangunan Putrajaya menghabiskan biaya 5 miliar ringgit atau setara US \$ 1,3 miliar, ditambah lagi kondisi ekonomi Malaysia kala itu tengah melemah hingga 6% pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi Asia. Pemerintah Malaysia akhirnya membatalkan sejumlah proyek penting seperti bandara regional, jalan raya dan juga bendungan listrik tenaga air senilai US \$ 5 miliar.

Selain itu mekanisme pembiayaan pemindahan ibu kota Malaysia, berdasarkan keputusan pemerintah Malaysia tanggal 30 Agustus 1995, menyatakan bahwa pembiayaan pembangunan Putrajaya tidak dibebankan pada anggaran Negara secara langsung melainkan melalui konsorsium yang dibentuk pemerintah Putrajaya Holding dengan pembagian perusahaan minyak Negara Petronas sebesar 40%, Khazanah Holdings 40% dan Kumpulan Wang Amanah Negara 20%. Malaysia tidak melibatkan pihak asing dalam pembiayaan pembanguna ibu kota Negeranya. Menurut pemerintah Malaysia, dengan demikian maka kemandirian pemerintah akan lebih terjaga dari intervensi kepentingan asing yang berpotensi mereduksi kedaulatan yang dapat merugikan kepentingan nasional Malaysia.

Jika pembangunan Putrajaya menghabiskan biaya sebesar US \$ 1,3 miliar maka pembangunan ibu kota Nusantara memerlukan biaya sebesar US \$ 32-33 miliar atau setara dengan 485 triliun Rupiah, biaya ini termasuk biaya pembangunan infrastruktur utama seperti gedung-gedung pemerintahan, fasilitas publik dan berbagai sarana pendukung lainnya. Mekanisme pembiayaan pemindahan ibu kota Nusantara juga berbeda dengan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Mekanisme pembiayaan ibu kota Nusantara dilakukan melalui kombinasi antara pendanaan pemerintah dan investasi swasta.

Pemerintah Indonesia akan membiayai sekitar 20% dari total biaya pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan raya, jembatan dan gedung-gedung pemerintahan. Sekitar 80% biaya proyek diharapkan akan datang dari investasi swasta, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk menarik investasi ini, pemerintah telah menyediakan berbagai insentif, termasuk hak atas tanah hingga 190 tahun dan berbagai kemudahan lainnya untuk investor yang tertarik berpartisipasi dalam proyek ini. Pemerintah juga menggunakan skema kemitraan publik-swasta sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dana untuk pembangunan proyek-proyek tertentu di ibu kota Nusantara. Dalam skema ini, pihak swasta dapat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dengan imbalan berupa konsesi atau pengelolaan aset dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah juga mencari sumber pendanaan alternatif lainnya seperti penerbitan obligasi, serta kerjasama dengan lembaga keuangan internasional yang dapat menyediakan pinjaman atau hibah untuk mendukung pembangunan proyek ini.

Namun proses pembangunan ibu kota Nusantara nyatanya menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari segi pembiayaan. Hingga saat ini, minat investor asing terhadap proyek ini masih rendah, kondisi ini tentu saja mempengaruhi kelancaran pendanaan. Meskipun telah ada investasi yang masuk sekitar US \$ 3,5 miliar, namun jumlah ini masih jauh dari target yang diharapkan pemerintah Indonesia. Minimnya minat dari investor asing disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpastian ekonomi global serta kekhawatiran terhadap kelayakan proyek ini dalam jangka panjang. Selain itu, pembangunan ibu kota Nusantara juga menghadapi berbagai keterlambatan, termasuk masalah pengadaan lahan dan pelaksanaan proyek di lapangan. Keterlambatan ini menyebabkan peningkatan biaya dan memperlambat proses pemindahan ibu kota.

Rencana pemindahan ibu kota suatu Negara selalu berlandaskan alasan yang tidak terlalu jauh berbeda, mulai dari untuk mengurai kepadatan penduduk hingga pemerataan ekonomi namun dalam prosesnya, rencana pemindahan ibu kota suatu negara memiliki pola yang berbeda-beda. Tantangan yang dihadapi tiap Negara dalam proses pemindahan ibu kota berbeda-beda satu

dengan yang lain. Akan tetapi, seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia perlu belajar dari Malaysia dalam proses pemindahan ibu kota Negara, maka beberapa hal yang dapat diambil sebagai pembelajaran bagi Indonesia antara lain;

Pertama, pemisahan fungsi ibu kota Negara. Malaysia memisahkan fungsi pemerintah dan juga fungsi ekonomi dimana, Kuala Lumpur tetap menjadi pusat ekonomi dan keuangan sementara Putrajaya menjadi pusat pemerintahan. Indonesia bisa meniru mode ini dengan tetap menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis sementara pusat pemerintahannya berada di Nusantara. Namun menerapkan model ini bukannya tanpa tantangan karena aktivitas ekonomi dan investasi jika akan tetap terpusat di Jakarta dapat mengurangi efektivitas upaya untuk mendistribusikan pembangunan ekonomi secara lebih merata.

Kedua, mekanisme pembiayaan Malaysia yang tidak “menggadaikan Negara” kepada pihak asing. Pembiayaan pembanguna Putrajaya tidak mengandalkan utang luar negeri tetapi mengandalkan kemampuan sendiri melalui skema pembiayaan patungan yang meringankan beban negara. Sementara mekanisme pembiayaan pembangunan ibu kota Nusantara yang mengandalkan 80% pembiayaan dari investasi swasta memiliki sejumlah resiko seperti ketergantungan yang tinggi pada investasi asing membuat proyek ini menjadi rentan terhadap perubahan sentimen pasar global. Insentif hak atas tanah hingga 190 tahun bagi investor juga menimbulkan resiko jangka panjang terhadap kedaulatan dan kontrol Negara atas lahan di ibu kota Nusantara. Selain itu, ketidakstabilan kebijakan dan politik juga perlu menjadi perhatian pemerintah karena jika investor merasa ada ketidakpastian hukum atau ada perubahan kebijakan yang dianggap merugikan maka investor dapat menarik diri dari proyek ini.

Ketiga, pembangunan ibu kota Negara merupakan sebuah proses panjang dan berkelanjutan sehingga proses pemindahan ibu kota Negara tidak akan selesai dalam satu periode kepemimpinan. Oleh karenanya, harus ada komitmen pemerintahan selanjutnya untuk melanjutkan program ini.

3.3. Dinamika Kawasan Asia Pasifik sebagai Faktor Utama dalam Merancang Kebijakan Luar Negeri

Kawasan Asia Pasifik merupakan salah satu wilayah yang paling dinamis dan strategis di dunia, baik dari segi ekonomi, politik, maupun keamanan. Kawasan ini bagi banyak peneliti hubungan internasional disinyalir sebagai ‘tempat bermain’ kekuatan besar (*great power*) seperti Amerika Serikat dan Tiongkok (Heydarian, 2015). Asia Pasifik menjadi *center of gravity* bagi politik internasional yang terjadi di era modern, seperti munculnya kekuatan Jepang yang mencoba mendominasi Asia pasca Perang Dunia I yang kemudian diakhiri dengan bom Hiroshima-Nagasaki, adu kekuatan antara demokrasi dengan komunisme di Asia Tenggara, eksistensi Korea Utara sebagai ancaman dunia, konflik Taiwan yang menarik perhatian dunia, hingga yang terjadi saat ini konflik Laut Tiongkok Selatan sebagai isu keamanan utama dalam kajian hubungan internasional.

Sebagai salah satu negara yang terletak di Asia Pasifik, Indonesia memiliki kepentingan yang signifikan dalam merespons dinamika yang terjadi di kawasan ini. Dinamika kawasan Asia Pasifik menjadi faktor utama dalam merancang kebijakan luar negeri Indonesia, terlebih peluang Indonesia sangat besar dalam memainkan peran penting di Asia Pasifik melalui kebijakan poros maritimnya. Vibhanshu Shekhar (2018) bahkan menyebut Indonesia sebagai salah satu pemain penting dan mampu menjadi kekuatan baru (*emerging power*) di Asia Pasifik.

Dalam mendesain kebijakan luar negerinya, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi Indonesia, diantaranya adalah dinamika ekonomi kawasan, persaingan geopolitik kawasan, tantangan keamanan non-tradisional, serta peran diplomasi Indonesia di kawasan. Keempat faktor ini mempengaruhi desain kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk dala merancang kebijakan luar negeri pasca penetapan Nusantara sebagai ibu kota baru.

3.4. Dinamika Ekonomi di Asia Pasifik

Asia Pasifik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global, dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia. Negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan telah menjadi kekuatan ekonomi utama yang mempengaruhi arus perdagangan dan investasi internasional, termasuk di kawasan ini. Bagi Indonesia, dinamika ekonomi di kawasan ini

menawarkan peluang besar untuk memperkuat ekonomi nasional melalui peningkatan perdagangan dan investasi.

Indonesia, sebagai anggota ASEAN, harus terus memperkuat perannya dalam kerangka kerja sama ekonomi regional seperti *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Keterlibatan Indonesia dalam RCEP, yang merupakan perjanjian perdagangan terbesar di dunia, memberikan akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Secara praktis, ada pertimbangan ekonomis yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia pasca pemindahan ibu kota. Sebagaimana tujuan pemindahan ibu kota untuk pemerataan ekonomi di Indonesia (Rachmawati, Haryono, & Rohmah, 2021), maka posisi strategis ibu kota Nusantara akan dapat membantu percepatan pemerataan ekonomi di Indonesia, terutama bagian tengah hingga timur. Dalam rangka mendorong percepatan pemerataan ekonomi itulah kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks ekonomi akan mengalami perubahan positif dimana Indonesia akan lebih aktif dalam melakukan diplomasi ekonomi.

Diplomasi ekonomi yang lebih aktif tersebut dapat berupa terdorongkannya investasi luar negeri ke Indonesia terutama dalam pembangunan ibu kota baru dan daerah sekitarnya. Investasi tersebut antara lain dalam sektor infrastruktur, transportasi, dan jasa, serta tidak menutup kemungkinan pada sektor lainnya. Selain itu juga disinyalir nilai perdagangan baik bilateral maupun multilateral akan meningkat sebab lebih dekatnya pusat pembangunan Indonesia yang baru, Nusantara, dengan jalur ALKI II, dimana 40% perdagangan dunia melewati jalur ALKI. Praktis perdagangan internasional Indonesia tidak lagi harus berhenti di pelabuhan utama di pulau Jawa, melainkan dapat terdistribusi dengan cepat dan lebih masif melalui ALKI II dan berhenti di Kalimantan atau Sulawesi. Diproyeksikan dari hal tersebut akan terjadi peningkatan konektivitas antar provinsi dan meningkatkan hingga 50% arus perdagangan di Indonesia (Sugiarto, 2022).

Tidak bisa dipungkiri bahwa Nusantara menjadi magnet ekonomi baru yang menggerakkan perekonomian Indonesia. Pemerintah tentu akan mengambil langkah strategis terutama dalam merancang kebijakan luar negerinya melalui diplomasi. Indonesia akan menguatkan perannya dalam forum kerjasama ekonomi baik di kawasan maupun dunia, selain itu Indonesia juga akan lebih aktif menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain atau lebih agresif dalam meningkatkan kerjasama tersebut. Seperti melalui *Comprehensive Economic Partnership Agreement* yang dilakukan secara bilateral dengan negara lain yang mungkin sebelumnya hanya menjadlin kerjasama umum seperti perdagangan bebas pada komoditas tertentu.

3.5. Persaingan Geopolitik dan Stabilitas Regional

Kawasan Asia Pasifik juga menjadi arena persaingan geopolitik antara kekuatan besar dunia. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam hal pengaruh politik dan militer, terutama di Laut China Selatan, memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan luar negeri Indonesia (Pratiwi, 2017). Sebagai negara yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan, Indonesia perlu menjaga keseimbangan dalam hubungannya dengan kedua negara tersebut tanpa mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasionalnya.

Dengan berpindahnya ibu kota yang justru semakin mendekati pusat konflik, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Hal ini juga diperburuk dengan minimnya dukungan pertahanan dan keamanan di sekitar Nusantara dan lebih luas lagi, di Kalimantan Timur (Wirawan, 2020). Kalimantan Timur hanya disokong oleh satu Komando Daerah Militer (Kodam), satu markas Kepolisian Daerah (Polda) Provisi, tiga Pangkalan Angkatan Laut (Lanal), satu Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal), dan satu Pangkalan Angkatan Udara (Lanud). Profil pertahanan-keamanan ini tentu jauh dari standar ideal untuk pengamanan sebuah ibu kota. Apalagi hingga awal Nusantara berdiri belum terdapat rencana serius untuk menambah satuan pertahanan-keamanan dari pemerintah selain rencana membangun markas besar TNI-Polri di Nusantara.

Konflik Laut Tiongkok Selatan memunculkan ancaman dan beban kebijakan luar negeri baru bagi Indonesia. Dalam skenario bila konflik ini mengalami eskalasi yang ekstrim dan memiliki kecenderungan pada perang fisik, maka jalur ALKI II Indonesia menjadi sangat strategis bagi pihak yang berperang, dalam konteks ini Amerika Serikat dan Tiongkok. Jalur ini menjadi salah satu jalur

alternatif distribusi kekuatan barat yang mengarah ke Laut Tiongkok Selatan, terutama dari Australia.

Dilema yang akan dialami oleh Indonesia pada skenario ini adalah memberikan izin kepada militer AS dan sekutunya untuk melintas, namun menaikkan potensi konflik dengan Tiongkok. Termasuk sebaliknya, apabila Indonesia mengizinkan militer Tiongkok untuk berlayar, maka Indonesia akan berpotensi berselisih dengan AS. Dilema ini kemudian yang harus dimitigasi oleh pemerintah setelah pindahnya ibu kota ke Nusantara.

Indonesia telah lama menganut prinsip kebijakan luar negeri "bebas dan aktif", yang memungkinkan negara ini untuk tidak memihak dalam konflik global atau regional tetapi tetap aktif dalam menjaga stabilitas kawasan. Indonesia sendiri sebenarnya sudah memulai mengambil peran strategis dalam penyelesaian konflik kawasan ini sejak lama. Setidaknya pada tahun 1990, Indonesia ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi informal pada *Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea* (Laksmi, Mangku & Yuliartini, 2022). Indonesia juga sudah memulai langkah serius pada tahun 2002 dengan menyetujui *Declaration of the Conduct of the Parties in South China Sea* yang merupakan cikal bakal awal inisiasi *Code of Conduct*.

Dalam konteks Laut Tiongkok Selatan, Indonesia berupaya untuk memperkuat peran ASEAN sebagai mediator dalam sengketa tersebut, dengan mendorong dialog dan penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai. Kebijakan ini tercermin dalam inisiatif Indonesia dalam memperkuat *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) pada keketuaan Indonesia tahun 2023, menginisiasi *Extended ASEAN Maritime Forum* (EAMF) di Manila, dan ikut mendorong terbentuknya *Code of Conduct* (CoC) terhadap pengelolaan Laut Tiongkok Selatan yang menekankan pentingnya kerja sama, inklusivitas, dan aturan hukum dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

Tentu dogma kebijakan luar negeri 'bebas aktif' sebagai *underlying doctrine* tidak akan berubah pada masa mendatang. Oleh sebab itu, praktis menjadi sebuah keniscayaan bagi Indonesia untuk tetap netral pada konflik dua negara adidaya tersebut. Indonesia akan mempertahankan wilayah ALKI sebagai kawasan bebas navigasi untuk keperluan non-militer. Sementara untuk tujuan militer, Indonesia akan dengan tegas melarang negara lain untuk melintasi, meski hanya dengan atribut militer yang jauh dari kebutuhan minimumnya.

3.6. Tantangan Keamanan Non-Tradisional

Selain isu geopolitik, kawasan Asia Pasifik juga menghadapi tantangan keamanan non-tradisional yang semakin kompleks, seperti terorisme, perubahan iklim, dan kejahatan lintas negara. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap bencana alam dan perubahan iklim, harus mengintegrasikan isu-isu ini dalam kebijakan luar negerinya.

Sebagaimana temuan Rendy Wirawan (2020) yang menyebutkan bahwa kawasan Nusantara ternyata memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap ancaman keamanan non-tradisional. Ancaman keamanan non-tradisional yang dimaksud adalah ancaman seperti perdagangan dan penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, pembajakan laut hingga terorisme. Dimana ancaman ini masuk melalui daratan perbatasan dan sebagian besar melalui jalur laut di jalur ALKI II.

Apabila ancaman geopolitik bersifat *long term threat*, ancaman non-tradisional justru sudah eksis sebelum Nusantara berdiri dan dapat semakin intens semenjak Nusantara menjadi kota baru dengan pusat perekonomian baru. Oleh sebab itu, Indonesia perlu melakukan *adjustment* terhadap kebijakan luar negerinya, terutama dalam merespon ancaman non-tradisional ini.

Hingga saat ini, Indonesia telah aktif dalam berbagai forum regional dan internasional yang membahas keamanan non-tradisional, seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan *East Asia Summit* (EAS). Selain itu, Indonesia juga berperan dalam mengembangkan kerja sama regional untuk penanggulangan terorisme, melalui inisiatif seperti *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) dengan Malaysia dan Filipina, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan di Laut Sulu dan Laut Sulawesi.

Kontribusi Indonesia di banyak forum di kawasan selayaknya semakin diintensifkan guna menanggulangi isu keamanan non-tradisional ini. Indonesia diduga akan meningkatkan keamanan Nusantara, terutama di jalur ALKI II untuk menanggulangi ancaman yang diuraikan sebelumnya.

Namun, Indonesia tentu tidak melakukannya sendiri. Sebab ancaman non-tradisional ini juga menjadi ancaman negara tetangga seperti Filipina dan Malaysia, maka Indonesia akan memaksimalkan kerjasama TCA yang sudah dibuat sebelumnya namun 'mati suri'.

3.7. Peran Diplomasi Indonesia di Asia Pasifik

Indonesia memiliki peran penting dalam diplomasi di kawasan Asia Pasifik, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. Sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk arsitektur keamanan dan ekonomi di kawasan ini.

Diplomasi Indonesia di kawasan Asia Pasifik juga didasarkan pada upaya untuk memperkuat solidaritas ASEAN dan mempromosikan prinsip-prinsip inklusivitas, stabilitas, dan kesejahteraan bersama. Melalui peran aktifnya di berbagai forum internasional, seperti APEC dan G20, Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan nasional sambil berkontribusi pada pembangunan dan stabilitas regional.

4. Simpulan

Dinamika kawasan Asia Pasifik merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam merancang kebijakan luar negeri Indonesia. Ekonomi yang berkembang pesat, persaingan geopolitik yang intens, serta tantangan keamanan non-tradisional memerlukan kebijakan luar negeri yang responsif, fleksibel, dan proaktif. Dengan tetap berpegang pada prinsip "bebas dan aktif". Meski dengan pindahnya ibu kota negara ke Nusantara, Indonesia tetap akan beradaptasi dengan kebijakan luar negerinya menyesuaikan dengan tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS). Data Kependudukan DKI Jakarta. Diakses dari <https://jakarta.bps.go.id>
- Britannica. (n.d.). "Brasília". Diakses dari <https://www.britannica.com/place/Brasilia>
- CNN Indonesia. (2019). "Sejarah Pemindahan Ibu Kota Sejak Era Hindia Belanda" Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429081114-20-390452/sejarah-pemindahan-ibu-kota-sejak-era-hindia-belanda>
- Demographia World Urban Areas. 19th Annual Edition (2023). Diakses dari <http://www.demographia.com>
- Humas Setkab. (2019). "Digagas Sejak Era Soekarno, Presiden Jokowi Jelaskan Alasan Perlunya Pemindahan Ibu Kota Negara." Diakses dari <https://setkab.go.id/digagas-sejak-era-soekarno-presiden-jokowi-jelaskan-alasan-perlunya-pemindahan-ibu-kota-negara/>
- Institut Teknologi Bandung (ITB). Studi Penurunan Tanah di Jakarta. Diakses dari <https://itb.ac.id>
- Jakarta Post. (2022). "Land Subsidence in Jakarta: An Ongoing Crisis". Diakses dari <https://www.thejakartapost.com>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2021). "Pembangunan Ibu Kota Negara Baru". Diakses dari <https://www.bappenas.go.id>
- Kompas. (2019). "Alasan Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur". Diakses dari <https://www.kompas.com>
- Kompas. (2023). "Geostrategi Bung Karno Pindahkan IKN". Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2023/06/20/10300551/geostrategi-bung-karno-pindahkan-ibu-kota-negara?page=all#google_vignette
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Laporan Penurunan Tanah di Jakarta. Diakses dari <https://lapan.go.id>
- Malaysian Government. (n.d.). "Putrajaya - A New Federal Territory". Diakses dari <https://www.malaysia.gov.my>
- Presiden Joko Widodo. (2019). "Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019". Diakses dari <https://setkab.go.id>

- Sumarno. Universitas Muhammadiyah Jakarta. (2020). "Pembelajaran dari Malaysia Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara"
- The Diplomat. (2024). "Indonesia's Jokowi Makes Move to New Capital Nusantara" diakses dari <https://thediplomat.com/2024/07/indonesias-jokowi-makes-move-to-new-capital-nusantara/>
- The Express Tribune. (2013). "Why Islamabad became Pakistan's capital". Diakses dari <https://tribune.com.pk>
- The Star. (2024) "Indonesia's new capital city Nusantara has received US\$3.5bil in investments, says President Jokowi" diakses dari <https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2024/08/13/indonesia039s-new-capital-city-nusantara-has-received-us35bil-in-investments-says-president-jokowi>
- World Population Review. Population Density by City 2023. Diakses dari <https://worldpopulationreview.com>
- Heydarian, R.J. 2015. Asia's new battlefield: the USA, China, and the struggle for the Western Pacific. London, Zed Books.
- Laksmi, L.G.C.S., Mangku, D.G.S., & Yuliartini, N.P.R. (2022). Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa internasional di Laut Cina Selatan. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(2), 225-242.
- Pratiwi, Y.D. (2017). Posisi Indonesia dalam konflik Laut Tiongkok Selatan. Defendonesia. 2(2), 35-24.
- Rachmawati, R., Haryono, E., & Rohmah, A.A. 2021. Developing smart city in the new capital of Indonesia. IEEE International Smart Cities Conference (ISC2) (pp. 1-7). IEEE.
- Shekhar, V. 2018. Indonesia's foreign policy and grand strategy in the 21st century. London, Routledge.
- Sugiarto, E.C. 2022. 'IKN Nusantara magnet pertumbuhan ekonomi baru dan smart city'. Kementerian Sekretaris Negara, disadur melalui tautan berikut, https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city.
- Wirawan, R. (2020). IKN di Kalimantan Timur: analisis isu pertahanan-keamanan dan geopolitik dalam dimensi hubungan internasional. Dalam Rosmini, M. Arifin, Y. Anggraini (eds.), Membaca ibu kota negara secara multidisiplin. Samarinda, Mulawarman University Press.